

ANALISIS PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS SEKTOR PERTANIAN DI KECAMATAN CIBINGBIN KABUPATEN KUNINGAN

Jajang Cahyadiana, Lalas Sulastri

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang

E-mail: lalassulastri04@gmail.com

ABSTRACT. About the research that the author is doing is to get an overview of the implementation of the Productivity and Agricultural Sector Productivity Program Improvement Program in Cibingbin District, Kuningan Regency, the weaknesses of the implementation of the Productivity and Agriculture Sector Productivity Development Program in Cibingbin District, Kuningan Regency, and efforts to overcome the Program policies Increasing and Developing Agriculture Sector Productivity in Cibingbin District, Kuningan Regency. The method used in this study is a qualitative research method with independent variables, namely: Implementation of Productivity and Agricultural Sector Productivity Development Programs. The sampling technique used was purposive sampling, namely the sampling technique for data sources with certain considerations. The data / information sources are: A Head of PTP3 UPTD, a Head of PTP3 UPTD Subdivision, 2 PTP3 UPTD POPTs and 1 PTP3 UPTD Executor. Whereas in analyzing the data used the Miles and Huberman Model with steps: data reduction, data presentation, concentration drawing / verification and Triangulation. Based on the results of interviews and data analysis, it was concluded that the Implementation of the Productivity and Agricultural Sector Productivity Development Program in Cibingbin District was quite good, although there were still indicators that still needed improvements in its implementation. Factors influencing the Implementation of Productivity and Agricultural Sector Productivity Development Program in Cibingbin District, Kuningan Regency, namely: Environmental conditions, Relations between organizations, Resources for program implementation and Characteristics and female agent implementation. Efforts to improve the implementation of the Productivity and Agriculture Sector Productivity and Development Program in Cibingbin District, Kuningan Regency, include: a tiered revision of the policy mismatch, information dissemination in the form of socialization, holding a training or coaching gradually for PTT3 UPTD staff and then applied to farmer groups. through an intensification campaign, and maximizing existing facilities and proposing additional facilities to the central Government

Keywords: Productivity program improvement program

PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan sektor yang berperan penting terhadap perekonomian nasional, sumbangannya terhadap pendapatan devisa negara di luar minyak dan gas bumi serta dalam perekonomian rakyat tidak bisa diabaikan. Pertanian akan menjadi kekuatan besar jika dikelola secara terpadu dalam satu kesatuan sistem agribisnis, sehingga beban pertanian yang terlalu berat menampung tenaga kerja dapat teratasi.

Peran pemerintah dalam pembangunan merupakan hal yang mutlak, tidak terlepas juga pengembangan

pertanian berkelanjutan. Faktor pendukung peran pemerintah dalam pengembangan pertanian tersebut adalah kelembagaan, kesadaran masyarakat, ketersediaan lahan pengembangan teknologi, dan peran swasta. Sedangkan yang menjadi faktor penghambatnya adalah alih fungsi lahan, keterbatasan kemampuan SDM, pemerataan sarana dan prasarana, ketersediaan dan pemanfaatan teknologi, dan obat kimia yang tidak ramah lingkungan.

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian,

perikanan, dan kehutanan dijelaskan bahwa penyuluhan sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum merupakan hak asasi warganegara Negara Republik Indonesia. Pembangunan pertanian yang berkelanjutan merupakan suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan dan bahan baku industri.

Sementara itu Kabupaten Kuningan merupakan salah satu daerah di Indonesia yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Khususnya daerah Cibingbin, hampir semua masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Ini didukung dengan data yang ada di kecamatan yakni keadaan umum dan potensi wilayah Pemerintahan Kecamatan Cibingbin terdiri dari 10 Desa dengan jumlah penduduk 41.828 orang terdiri dari laki-laki sebanyak 20.991 orang dan perempuan 20.837 orang, jumlah KK sebanyak 10.197 KK serta KK tani sebanyak 519 KK. Secara umum luas wilayah Kecamatan Cibingbin seluas 7.715 Ha dengan topografi wilayah umumnya bergelombang dan berbukit, khususnya wilayah selatan, utara dan timur dengan tingkat kemiringan berkisar antara 15-35 % dengan ketinggian 175-500 di atas permukaan air laut. Jenis tanah di Kecamatan Cibingbin dengan jenis tanah grumosol dan latasol.

Sementara itu luas potensi wilayah kecamatan Cibingbin terdiri atas lahan sawah seluas 2.380 Ha dan kering 6.754 Ha, maka tidaklah heran jika Kecamatan Cibingbin memiliki potensi besar dalam sektor pertanian yang didukung oleh tingkat kesuburan yang baik, ketersediaan air maupun iklim serta faktor demografi yang secara turun temurun menjadikan pertanian sebagai mata pencaharian keluarga.

Berdasarkan data yang di ambil dari UPTD Pertanian, Peternakan dan Perikanan (UPTD PTP3) Pemerintahan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan dapat

dilihat bahwa sebagian besar masyarakat Kecamatan Cibingbin bermatapencaharian sebagai petani dengan klasifikasi jumlah penduduk menurut mata pencahariannya.

Hasil penelitian awal yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa program peningkatan dan pengembangan produktivitas pertanian sudah dilaksanakan akan tetapi belum dilaksanakan secara maksimal. Dalam implementasinya masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki agar mampu sejalan dengan kebijakan yang telah dibuat. Hal ini dapat dilihat dari indikasi-indikasi sebagai berikut :

1. Belum optimalnya program peningkatan dan pengembangan produktivitas sektor pertanian misalnya dalam sarana dan prasarana
2. Masih terdapat permasalahan dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program peningkatan dan pengembangan produktivitas sektor pertanian
3. Kurang lancarnya pemasaran hasil usaha tani sehingga keberhasilan dalam peningkatan produksi secara fisik tidak diikuti dengan harga jual yang memadai sehingga nilai tukar tani selalu rendah.

Untuk mengatasi permasalahan yang diteliti, maka penulis memfokuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah program peningkatan dan pengembangan produktivitas sektor pertanian di Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan?
2. Apa saja faktor yang menghambat dalam program peningkatan dan pengembangan produktivitas sektor pertanian di Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan ?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan suatu program peningkatan dan pengembangan produktivitas sektor pertanian di Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan ?

Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi program peningkatan dan pengembangan produktivitas sektor pertanian di Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan.
2. Hambatan-hambatan dalam program peningkatan dan pengembangan produktivitas sektor pertanian di Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan.
3. Upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam program peningkatan dan pengembangan produktivitas sektor pertanian di Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan.

TINJAUAN PUSTAKA

Program kerja dapat diartikan sebagai suatu rencana kegiatan dari suatu organisasi yang terarah terpadu dan tersistematis yang dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan oleh suatu organisasi. Menurut Jones (1994: 45) mengemukakan bahwa : Program yaitu cara yang disahkan untuk mencapai tujuan dimana melalui hal tersebut bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan demi tercapainya kegiatan pelaksanaan karena dalam program tersebut telah dimuat berbagai aspek yang harus dijalankan atau dilaksanakan agar tujuan program itu sendiri dapat tercapai.

Sementara itu menurut Daryanto (2005: 91) berpendapat bahwa: Program kerja diartikan sebagai suatu rencana kegiatan dari suatu organisasi yang terarah, terpadu dan tersistematis yang dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan oleh suatu organisasi. Program kerja ini akan menjadi pegangan bagi organisasi dalam menjalankan rutinitas roda organisasi. Program kerja juga digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita organisasi.

Menurut Rippley dan Franklin dalam buku Tangkilisan (2003: 21) menyatakan keberhasilan implementasi

kebijakan program dapat ditinjau dari tiga faktor yaitu:

1. Perspektif kepatuhan (compliance) yang mengukur implementasi dari kepatuhan atasan mereka.
2. Keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan.
3. Implementasi yang berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan.

Peters (1982) dalam buku Tangkilisan (2003: 22) mengatakan implementasi kebijakan program yang gagal disebabkan beberapa faktor:

1. Informasi
2. Isi kebijakan
3. Dukungan
4. Pembagian potensi

METODE

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif atau sering disebut dengan naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Penyusunan mengambil sejumlah orang berdasarkan pertimbangan bahwa yang bersangkutan berkompeten dan bertanggung jawab mengenai program yang dimiliki oleh UPTD Pertanian Peternakan dan Perikanan (PTP3) Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan. Sedangkan penentuan informan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013: 218).

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Oleh karena itu data yang diperoleh dilakukan melalui:

1. Studi Kepustakaan
2. Studi lapangan (Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi)
3. Triangulasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Program Peningkatan dan Pengembangan Produktivitas Sektor Pertanian di Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan

1. Kondisi lingkungan

Keadaan Alam, khususnya keadaan alam sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi program peningkatan dan pengembangan produktivitas pertanian Kecamatan Cibingbin. Keadaan alam di dalam wilayah binaan UPTD PTP3 berbeda antara satu dengan yang lainnya namun keadaan alam tersebut dapat diatasi dengan penanaman tanaman yang berbeda dan cocok sesuai kondisi keadaan alam yang tersedia.

Keadaan sosial, sangat berpengaruh terhadap berjalannya proses implementasi program peningkatan dan pengembangan produktivitas pertanian. Dengan adanya respon dan dukungan dari kelompok sasaran maupun kelompok kepentingan akan mempermudah proses implementasi program peningkatan dan pengembangan produktivitas sektor pertanian di Kecamatan Cibingbin.

2. Hubungan Antar Organisasi

Koordinasi antar Instansi Pemerintah, hubungan antar organisasi khususnya hubungan antar instansi pemerintah sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi program peningkatan dan pengembangan produktivitas sektor pertanian Kecamatan Cibingbin. Koordinasi dengan instansi pemerintah lain merupakan suatu proses kerjasama yang saling mendukung satu sama lain dalam pelaksanaan program peningkatan dan pengembangan produktivitas sektor pertanian kecamatan Cibingbin agar program tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Koordinasi dengan Kelompok Tani, merupakan suatu kerjasama antara instansi pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan kelompok sasaran kebijakan yang mana hal ini sangat diperlukan demi berjalannya suatu program dari pemberi kebijakan dan juga sasaran kebijakan.

Pengawasan, pengawasan dari instansi terkait dalam proses implementasi program kebijakan sangat penting dalam mendukung berlangsungnya pelaksanaan program. Begitu juga untuk implementasi program peningkatan dan pengembangan produktivitas sektor pertanian di Kecamatan Cibingbin, pengawasan yang dilakukan oleh UPTD PTP3 dan UPT BP3K sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut. Pengawasan yang dilakukan melalui pendampingan proses implementasi program dari awal hingga akhir atau dari awal proses sosialisasi hingga pasca panen yang kemudian dilakukan evaluasi hasil akhir.

3. Sumber Daya untuk Implementasi Program

Sumber Daya Manusia, merupakan hal yang mutlak dalam proses pelaksanaan implementasi program karena sumberdaya manusia yang memadai dengan memiliki kemampuan dan keahlian dalam melaksanakan pekerjaannya akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi program.

Sarana Prasarana, sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan implementasi program peningkatan dan pengembangan produktivitas pertanian. Karena sarana dan prasarana akan mampu mempercepat atau memperlambat laju pelaksanaan program sesuai dengan keadaan sarana dan prasarana.

Anggaran, anggaran yang tersedia akan sangat berpengaruh besar dalam membantu pelaksanaan program peningkatan dan pengembangan produktivitas pertanian. Faktanya, dengan

tersedianya anggaran yang memadai akan mampu memperlancar proses pelaksanaan program tersebut karena yang menentukan tersedianya berbagai kebutuhan dalam program tersebut adalah tersedianya anggaran yang memadai.

4. Karakteristik dan Kemampuan Agen Pelaksana

Kemampuan, kemampuan pegawai dan kelompok tani dalam proses pelaksanaan setiap tahapan dilapangan akan sangat menentukan keberhasilan program peningkatan dan pengembangan produktivitas pertanian. UPTD PTP3 dan kelompok tani harus saling mendukung satu sama lain dalam mendukung program baik itu dari peningkatan kemampuan dalam pelaksanaannya maupun dalam setiap tahapan implementasi program peningkatan dan pengembangan produktivitas pertanian di Kecamatan Cibingbin.

Keterampilan, keterampilan dari kelompok sasaran juga sangatlah penting, karena keberhasilan program peningkatan dan pengembangan produktivitas pertanian akan sangat ditentukan dari hasil produksi pertanian dari kelompok tani. Keterampilan yang dimaksud berupa keahlian dalam melaksanakan setiap tahapan pelaksanaan implementasi program peningkatan dan pengembangan produktivitas sector pertanian baik itu dari pegawai yang ada di UPTD PTP3 maupun dari kelompok tani sebagai pelaksana program tersebut.

Faktor-Faktor yang Menghambat Implementasi Kebijakan

1. Isi Kebijakan

Ketidaksesuaian kebijakan, akan sangat berpengaruh terhadap berjalannya program, jika kebijakan itu sesuai maka akan terjadi sinkronisasi dalam mendukung pelaksanaan program dapat berjalan lancar tetapi jika isi kebijakan itu tidak sesuai maka pelaksanaan kegiatan

dilapangan tidak akan sesuai dengan yang diharapkan.

2. Informasi

Komunikasi, dalam sebuah organisasi khususnya di UPTD PTP3 Kecamatan Cibingbin sangatlah penting, komunikasi yang dilakukan dapat berupa informasi mengenai program baik itu dalam ruang lingkup UPTD PTP3 maupun antara UPTD PTP3 dengan kelompok tani (kelompok sasaran) agar maksud dan tujuan yang ada dalam informasi tersebut dapat dikerjakan sesuai yang direncanakan maka diperlukan komunikasi yang baik antara pihak-pihak terkait baik itu individu maupun kelompok.

Sosialisasi, merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan program karena sosialisasi menjabarkan tentang isi program dan tatacara dalam pelaksanaannya yang disampaikan secara langsung terhadap kelompok sasaran atau kelompok tani. Jika sosialisasi tidak berjalan baik maka akan berdampak terhadap pelaksanaan program. Jadi kendala dalam sosialisasi akan berpengaruh terhadap berjalannya program dan akan menjadi hambatan dalam pelaksanaan program.

3. Dukungan

Partisipasi Masyarakat, dalam pelaksanaan program sangat diutamakan dalam mendukung program tersebut dapat tercapai dengan apa yang diharapkan keikutsertaan masyarakat ini akan mempermudah dalam pelaksanaan implementasi program baik itu dalam pelaksanaan dilapangan maupun dalam mengawasi kebijakan-kebijakan yang dibuat.

Fasilitas, kelengkapan kantor seperti computer, infocus, kendaraan dinas dan kelengkapan lainnya maupun fasilitas untuk menunjang pelaksanaan dilapangan seperti saluran irigasi, mesin kelengkapan untuk menunjang pelaksanaan dilapangan (traktor, mesin panen, pompa air, dll) perlu

ditingkatkan agar hal tersebut tidak menjadi penghambat dalam pelaksanaan program peningkatan dan pengembangan produktivitas pertanian di Kecamatan Cibingbin.

4. Pembagian Potensi

Keahlian. Keahlian pegawai dan kelompok tani dalam melakukan kinerja perlu ditingkatkan lagi agar tidak menjadi penghambat berjalannya pelaksanaan program peningkatan dan pengembangan produktivitas pertanian atau pertanian terpadu. Dengan adanya peningkatan keahlian dari pegawai UPTD PTP3 dan kelompok tani maka akan mendorong keberhasilan program.

Pembagian Tugas. pembagian tugas dalam suatu organisasi merupakan hal yang sangat penting, karena kondisi pekerjaan pegawai dalam suatu organisasi akan berdampak terhadap kinerja organisasi itu sendiri. Sehingga dengan pembagian tugas yang tepat sesuai bidang yang ia tekuni maka kinerja organisasi pun akan mendapatkan hasil yang maksimal.

Upaya- Upaya Mengatasi Hambatan dalam Implementasi Kebijakan

1. Isi Kebijakan

Ketidaksesuaian isi kebijakan, upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program peningkatan dan pengembangan produktivitas pertanian tentang masalah ketidaksesuaian kebijakan dapat melalui revisi secara berjenjang dengan menyesuaikan isi kebijakan dengan keadaan dilapangan dan melalui evaluasi pasca panen membandingkan tentang hasil produksi dengan isi kebijakan, atau perbaikan-perbaikan dalam kebijakan disesuaikan dengan hasil evaluasi.

2. Informasi

Komunikasi, upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam komunikasi dapat melalui meningkatkan keterbukaan antar pegawai, sedangkan untuk komunikasi dengan kelompok tani dapat

melalui pertemuan-pertemuan atau rapat ekbang dengan pemerintahan Desa sebelum melakukan sosialisasi dengan harapan informasi tentang pertanian terpadu dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Kemudian setelah itu baru dilaksanakan sosialisasi mengenai program peningkatan dan pengembangan produktivitas pertanian.

Sosialisasi, upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam sosialisai dengan melakukan pendekatan-pendekatan terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum proses sosialisasi seperti berkoordinasi dengan lembaga yang ada di Desa atau melalui rapat ekbang agar informasi tentang sosialisasi menyebar kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga masyarakat berperan aktif mengikuti setiap tahapan pembinaan dalam sosialisasi.

3. Dukungan

Partisipasi masyarakat, upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam partisipasi masyarakat dengan cara meningkatkan kemauan masyarakat dalam partisipasi terhadap program atau setiap tahapan kegiatan dalam pelaksanaannya, hal tersebut bisa dengan pemberian motivasi dan informasi yang tepat, tentang pertanian terpadu atau dengan memberikan kebebasan terhadap masyarakat dalam keikutsertaannya untuk mengikut setiap tahapan kegiatan dilapangan.

Fasilitas, upaya untuk mengatasi hambatan kurang menunjangnya fasilitas yaitu dengan cara memaksimalkan fasilitas yang sudah tersedia sebaik mungkin, baik itu fasilitas di dalam kantor UPTD PTP3 maupun fasilitas pendukung dalam pelaksanaan program pertanian terpadu tersebut.

4. Pembagian potensi

Keahlian, upaya untuk meningkatkan keahlian pegawai dan kelompok tani yaitu dengan cara diadakannya pembinaan lapangan atau diklat secara berjenjang agar pegawai yang

bersangkutan tidak hanya menguasai satu bidang saja dalam melakukan pekerjaannya. Sedangkan untuk meningkatkan keahlian dari kelompok tani yaitu dengan diadakannya sosialisasi setiap tahapan pelaksanaan dilapangan tentang tatacara dalam pelaksanaan pertanian terpadu secara bejenjang kepada CPPL atau calon petani pelaksana dengan tingkatan Kecamatan, Desa dan Kelompok tani.

Pembagian Tugas. Upaya untuk mengatasi meningkatkan pembagian tugas yaitu dengan diadakannya pembinaan lapangan atau diklat secara berjenjang agar pegawai yang bersangkutan tidak hanya menguasai satu bidang saja dalam melakukan pekerjaannya. Sedangkan untuk meningkatkan keahlian dari kelompok tani yaitu dengan diadakannya sosialisasi setiap tahapan pelaksanaan dilapangan tentang tatacara dalam pelaksanaan pertanian terpadu secara bejenjang kepada CPPL atau calon petani pelaksana dengan tingkatan Kecamatan, Desa dan Kelompok tani.

PENUTUP

Keadaan alam, kondisi sosial, anggaran, kordinasi antar instansi pemerintah, kordinasi dengan petani, pengawasan, sumberdaya manusia, sarana-prasarana, kemampuan pegawai dan kelompok tani, keahlian pegawai dan kelompok tani, sudah berjalan dengan cukup baik meskipun ada beberpaa seperti sarana-prasaranan yang memang belum cukup memadai dan perlu di tingkatkan kembali. Lalu keahlian para pegawai juga dinilai masih kurang itu berari masih kurangnya pengadaan pelatihan bagi sumberdaya manusia di kecamatan tersebut. Beberapa faktor yang menjadi pemicu atau penghambat proses implementasi program kebijakan tersebut yang mana sebagiannya mereka mengetahui upaya-upaya yang bisa di lakukan seperti upaya untuk mengatai minimnya sarana dan prasarana yaitu dengan cara menggunakan dahulu sarana dan prasarana yang ada secara optimal

sehingga meskipun sarana dan prasarana tidak memadai tetapi sebagian masih bisa mereka gunakan dengan yang ada.

Ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan untuk meningkatkan implementasi program kebijakan diantaranya adalah peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dalam program peningkatan dan pengembangan produktivitas pertanian seperti penambahan alat-alat yang menunjang (kendaraan), komputer, infokus, penambahan sarana prasarana dalam pelaksanaan pertanian seperti mesin traktor, pompa air, mesin panen dan perbaikan saluran irigasi pertanian juga penambahan anggaran dana untuk menunjang program pertanian dan juga ada hal lain yang dapat mempengaruhi proses implementasi kebijakan program program peningkatan dan pengembangan produktivitas pertanian di UPTD PTP3 Kecamatan Cibingbin,

DAFTAR PUSTAKA

- Daryanto. (2005). *Pengantar Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Grava Media.
- Handyaningrat, Suwarno. (1999). *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV Hajimasagung.
- Hasibuan, S.P. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisian*. Yogyakarta. Ghalia ilmu.Gronroos, C. 2011. *Service Management and Marketing: Managing The Moment of Truth in Service Competition*. Massachusetts: Lexington.
- Jones, Charles. (1994). *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.Iskandar, Jusman. 2014. *Kapita Selektta Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*. Bandung: Puspaga.
- Siagian, S.P. (2004). *Filsafat Administrasi*. Jakarta. Gunung Agung.

Siagian, S.P. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Bumi Aksara.

Siagian, S.P. (2014). *Filsafat Manajemen*. Jakarta. Bumi Aksara.

Silalahi, Ulbert. (2007). *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Silalahi, Ulbert. (2009). *Studi tentang ilmu Administrasi. Konsep. Teori. dan Dimensi*. Bandung. Sinar Baru Algesindo.

Subarsono, AG. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tangkilisan, Hessel Nogi. S. (2003). *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Jakarta: Lukman Offset.